

ABSTRAK

Maudia Novianty : “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 – 2021 Kota Bandung (Studi Kasus DPRD Kota Bandung)”

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) bukan hanya dapat dilakukan oleh eksekutif namun juga oleh DPRD sebagai legislatif. Dimana pengawasan ini perlu dilakukan agar pengelolaan APBD itu sendiri dapat terlaksana dengan optimal. Berdasarkan hal tersebut dan faktor lainnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengembangkan bagaimana DPRD Kota bandung seharusnya pengawasan APBD dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan teori tentang pengawasan anggaran menurut (Handoko, 2017) dengan lima (5) dimensi yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksana kegiatan, pengukuran kegiatan pelaksanaan, perbandingan pelaksanaan nyata dengan standar, dan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, adapun Teknik penggumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Creswell: yaitu, mengolah dan mempersiapkan data untuk kemudian dianalisis, membaca ringkasan data, menganalisis lebih detail dengan melakukan coding data, menggambarkan proses koding untuk mendeskripsikan kategori, penyajian Informasi, penarikan kesimpulan melalui Interpretasi data.

Berdasarkan teori dan metode yang digunakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan APBD oleh DPRD Kota bandung sudah terlaksana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya ketidakjelasan dalam penerapan standar, belum diterapkannya pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan memadai, pengukuran pelaksanaan yang masih belum sesuai dengan standar, dan tindakan korektif yang sudah dilaksanakan namun belum memberikan kontribusi lebih bagi pelaksanaan pengawasan anggaran.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaan APBD, Pengawasan, anggaran

ABSTRACT

Maudia Novianty: "The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Oversight of the 2018 – 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the City of Bandung (Case Study of the Bandung City DPRD)"

The DPRD as the legislature has the authority to controlling the regional income and expenditure budget (APBD) in addition to the executive. Where this controlling is required in order to handle the APBD itself as effectively as possible The goal of this research is to comprehend and determine how the Bandung City DPRD should oversee the APBD based on these and other criteria.

This study applies the five (5) components of Handoko's (2017) theory of budget controlling, which includes creating standards, determining how to measure implementation activities, measuring implementation activities, comparing actual implementation to standards, and cooperating when discrepancies occur.

This study uses a qualitative approach with descriptive research types, while the data collection techniques used are: observation, interviews, and documentation studies. Furthermore, this study uses data analysis techniques from Creswell: namely, processing and preparing data for later analysis, reading data summaries, analyzing in more detail by coding data, describing the coding process to describe categories, presenting information, drawing conclusions through data interpretation.

This study draws the conclusion that the Bandung City DPRD's implementation of APBD oversight has not entirely gone as planned based on the theory and methodologies used Application of standards was found to be unclear, measurements of implementation of activities were not carried out adequately, measurements of implementation were still not in compliance with the standards, and corrective actions had been taken but had not made a bigger contribution to the implementation of budget oversight.

Keyword : Budget, APBD management, Regional People's Legislative Council, and controlling